

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Transjakarta Dapat Suntikan Dana Rp 633 Miliar

Palmerah, Warta Kota

Komisi B DPRD DKI Jakarta menyetujui penambahan dana Public Service Obligation (PSO) atau subsidi layanan Transjakarta dalam Raperda Perubahan APBD DKI 2023 sebesar Rp 633 miliar.

Transjakarta pun ditantang untuk terus mendorong peningkatan layanan bagi masyarakat pengguna transportasi umum.

"Ketika kami memberikan subsidi, masyarakat ini harus mendapatkan pelayanan yang baik," ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (16/9/2023).

Politikus senior Partai Demokrat ini pun menyoroti armada bus Transjakarta yang masih tetap beroperasi meski sepi penumpang.

"Perlu diperhitungkan ketika di jam-jam kosong penumpang, kenapa bus dan armada mitra Transjakarta itu tetap beroperasi," ujarnya.

"Kan itu harusnya bisa diefisienkan. Karena ini yang bikin beban subsidi terus membesar," sambungnya.

Anggota Komisi B lainnya, Pandapotan Sinaga pun meminta Transjakarta dan Dinas Perhubungan (Dishub) segera melengkapi dasar kajian perhitungan pemberian subsidi.

Menurutnya, penghitungan ini perlu dilakukan agar pemberian subsidi terukur dan tepat sasaran.

"Jangan-jangan yang menikmati subsidi

selama ini kelas menengah ke atas. Karena selama ini kami nggak pernah dikasih dasar perhitungannya," tuturnya.

Sebelumnya langkah Pemerintah DKI Jakarta dalam menggencarkan penggunaan transportasi publik demi menekan kemacetan dan polusi udara dipertanyakan. Soalnya dana subsidi atau PSO untuk PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dipangkas sekitar Rp 1 triliun

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari mengatakan, hal ini sangat kontradiktif dengan rencana pengurangan dana PSO PT Transjakarta untuk kebutuhan operasional yang awalnya Rp 3,9 triliun akan dipotong Rp 1 triliun untuk tahun anggaran 2024.

Eneng menungkapkan kekecewaannya terhadap perihal ini, bukannya pro terhadap transportasi publik, malah anggaran subsidi dipangkas.

"Katanya serius mau menangani kemacetan dan polusi udara tapi kenapa malah potong subsidi PSO Transjakarta? Ini berpotensi mengurangi layanan bus Transjakarta dan JakLinko/Mikrotrans yang dikelola Transjakarta, padahal sangat dibutuhkan masyarakat," kata Eneng pada Senin (28/8/2023).

Eneng menilai kondisi Jakarta saat ini darurat polusi udara, mestinya Pemprov mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transportasi publik agar kondisi udara membaik.

Selain itu kebijakan tersebut juga dapat mengurangi kemacetan di DKI karena jumlah pengguna kendaraan pribadi akan berkurang.

"Ini malah memotong anggaran PSO TransJakarta. Pemprov DKI gagal paham dalam kebijakannya juga dalam tata anggarannya," ujar Eneng dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Menurutnya, solusi jangka panjang dari kemacetan dan polusi udara adalah beralih ke transportasi publik utamanya yang berbasis listrik. Pemprov mestinya pro terhadap hal ini maka anggarannya pun lebih mendukung peningkatan kualitas transportasi publik bukan beli mobil listrik untuk ASN. (**faf/TribunJakarta**)